

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Australia adalah negara yang berada di bagian selatan dunia. Australia juga merupakan benua terkecil di dunia. Walaupun letaknya di dekat Asia, namun masyarakat Internasional lebih sering menyebut Australia sebagai dunia barat karena kehidupannya yang mirip dengan gaya kehidupan negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Negara yang merupakan bekas jajahan Inggris ini mempunyai delapan negara bagian, yaitu enam negara bagian dan dua wilayah besar. Enam negara bagian tersebut adalah New South Wales, Queensland, Victoria, Tasmania, Australia Barat (Western Australia), Australia Selatan (Southern Australia), dan dua wilayah besar yaitu Northern Territory dan Australian Capital Territory.

Australia yang merupakan sebuah benua terkecil di dunia dan mulai dihuni oleh manusia sejak abad es atau sekitar 30.000 tahun yang lalu ini adalah sebuah negara kolonial Inggris. Kolonialisasi Inggris di Australia menjadi sebuah bencana besar bagi penduduk Aborigin di Australia. Pada saat menetapkan Australia sebagai koloninya, Inggris sedang mengalami krisis ekonomi. Pemerintah Inggris mengambil kebijakan dengan mengirimkan para narapidana kejahatan dari Inggris dan Irlandia ke Australia. Kebijakan ini adalah salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi.

Para narapidana yang dikirim ke Australia ternyata membawa berbagai macam penyakit. Wabah penyakit yang dibawa oleh para pendatang dari

Eropa seperti cacar, campak, dan influenza menyebar di daerah pendudukan. Bangsa Eropa menganggap penduduk aborigin Australia sebagai pengembara yang dapat diusir dari tempatnya, sehingga pemerintah Inggris dengan mudah merampas tanah milik Aborigin untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan pertambangan. Perampas tanah ini tanpa disertai dengan ganti rugi. Hal ini menyebabkan banyak warga Aborigin yang kehilangan sumber hidupnya. Terlebih lagi dengan kondisi mereka yang lemah akibat asimilasi dari kebudayaan Eropa.

Sejak Inggris menduduki Australia sampai berdirinya sebuah pemerintahan di Australia, masyarakat Aborigin tidak pernah terlibat di dalam pemerintahan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengangkat peran masyarakat Aborigin dalam pemerintahan Australia. Dalam hal ini yang dimaksud dengan peran dalam pemerintahan adalah partisipasi masyarakat Aborigin dalam berlangsungnya pemerintahan Australia, seperti keikutsertaan dalam pemilu atau menjadi anggota parlemen. Selama pemerintahan Australia dijalankan sampai saat ini, tidak ada bukti nyata tentang peran yang melibatkan masyarakat Aborigin dalam pemerintahan tersebut.

Selama ini masyarakat hanya dikenal sebagai identitas atau suatu ciri khas Negara Australia, bahkan pernah dianggap sebagai salah satu kekayaan flora fauna di Australia. Hingga saat ini masyarakat Aborigin masih terjerat masalah ekonomi dan sosial. Selain termasuk kelompok etnis paling miskin, banyak Aborigin yang dipenjara, menganggur, dan buta huruf..

Sehingga menurut pemerintah masyarakat Aborigin tidak terlalu penting untuk ikut berpartisipasi langsung dalam pemerintahan.

Karena hal itulah masyarakat Aborigin tidak pernah diikutsertakan dalam pemilu Australia. Hal ini semakin memperlihatkan adanya diskriminasi antar masyarakat kulit berwarna (aborigin) dengan masyarakat kulit putih. Karena tidak berpendidikan, banyak warga Aborigin yang menganggur maka menyebabkan tidak mungkin bagi Aborigin untuk bisa bergaya hidup seperti layaknya kulit putih. Tanpa pendidikan yang memadai, banyak warga Aborigin yang tidak tahu cara membesarkan dan memperlakukan anak.

Australia baru mengalami perkembangan yang menyolok pada tahun 1880an-1910 dengan dibentuknya partai politik dan pemerintahan federal. Meskipun Australia menganut sistem multipartai, tetapi sejak tahun 1910 bisa dikatakan Australia menganut sistem dua partai. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua partai yang telah terbentuk yakni Partai Buruh dan Partai Liberal.

Partai Buruh merupakan partai tertua di Australia. Partai ini berdiri pada tahun 1890 ketika terjadi perang kelas dan pemogokan massal dari para buruh pemangkas bulu domba yang mengakibatkan terjadinya depresi ekonomi. Basis dukungan Partai Buruh adalah buruh, narapidana (dulu), dan imigran kulit berwarna, dan secara tidak langsung masyarakat aborigin termasuk didalamnya karena sebagian besar masyarakat aborigin adalah buruh tani dan mempunyai kulit berwarna. Secara tradisional pendukung partai ini umumnya beragama Katholik atau orang-orang yang tidak mempedulikan agama (atheis). Basis anggota dan sumber finansial Partai Buruh adalah

Serikat Buruh. Oleh sebab itulah Serikat Buruh mempunyai keterikatan yang sangat kuat dengan Partai Buruh.

Sejak awal berdiri, Partai Buruh banyak sekali diwarnai dengan perpecahan, misalnya perpecahan yang terjadi pada tahun 1916 ketika W.M. Hughes (Perdana Menteri dari Partai Buruh) menginginkan diadakan wajib militer. Sebaliknya mayoritas caucus Partai Buruh menolak usul tersebut. Kemudian terjadi pula perpecahan pada tahun 1931 ketika Partai Buruh memenangkan pemilu tahun 1929 dan pada saat itu pemerintahan Partai Buruh dihadapkan dengan krisis ekonomi yang sangat berat. Puncak dari segala konflik terjadi pada tahun 1954 ketika adanya perbedaan ideologi dalam tubuh Partai Buruh yakni Katholik dengan Komunis. Sejak saat itu sampai tahun 1960an menjadi lemah. Partai Buruh kembali bangkit pada awal tahun 1970an dengan ditandai kemenangan Pemilu tahun 1972 oleh Partai Buruh.¹

Pada saat ini Partai Buruh dipimpin oleh Kevin Rudd. Rudd adalah pemimpin federal Partai Buruh Australia (ALP). Beliau adalah anggota *Australian House of Representatives* sejak 1998 yang mewakili daerah pemilihan Griffith di Queensland. Sebelum terpilih sebagai Ketua Partai Buruh, beliau dikenal sebagai seorang diplomat. Rudd pernah bertugas di Stockholm dan Beijing. Rudd yang fasih berbahasa Mandarin juga pernah terpilih sebagai anggota parlemen pusat pada tahun 1988. Pada 4 Desember 2006, para politisi pusat memilihnya sebagai Ketua Partai Buruh Australia. Dengan suara 49:39, ia mengalahkan ketua sebelumnya, Kim Beazley.

¹ Dra. Nur Azizah, M.si, *Diktat Politik dan Pemerintahan Australia*, Fisipol UMY, 1999, hal 15.

Dengan kemenangan ini, ia berhak menantang Perdana Menteri John Howard dari konservatif pada pemilu tahun 2007.²

Pemilu tersebut dimenangkan oleh Partai Buruh Australia dan Kevin Rudd menjadi Perdana Menteri Australia. Kevin Rudd resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Australia terpilih pada tahun 2004 setelah mengalahkan lawannya John Howard yang berasal dari Partai Liberal dan telah berkuasa selama 11 tahun. Setelah kekalahan Partai Liberal, Howard yang berusia 68 tahun menyatakan akan mundur dari kegiatan politik Hal inilah yang menjadi sebab mengapa penulis memilih judul ini sebagai bahan penelitian.

Saat ini Partai Buruh yang dipimpin oleh Kevin Rudd terus mencoba memperbaiki hubungan antara warga kulit putih dengan warga kulit berwarna (aborigin). Usaha yang tengah dilakukan Kevin Rudd adalah mencoba memasukkan masyarakat asli kedalam konstitusi. Harapan ini yang diharapkan dapat meningkatkan peran politik masyarakat aborigin dalam pemerintahan Australia setelah Kevin Rudd menjabat sebagai Perdana Menteri Australia.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan selain sebagai syarat pelengkap studi tahap akhir juga diantara lain bertujuan untuk :

1. Mengembangkan ilmu yang didapat selama dibangku perkuliahan dengan menentukan metodologi yang sesuai dengan penelitian.

² www.wikipedia.com/perdana_menteri_Australia/Kevin_Rudd

2. Mengetahui sejauh mana masyarakat Aborigin berperan dalam pemerintahan Australia
3. Sebagai prasyarat meraih gelar sarjana strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu “*Bagaimanakah usaha Kevin Rudd meningkatkan peran masyarakat aborigin dalam kehidupan sosial politik di Australia (2007-2009)?*”

D. Kerangka Pemikiran

Untuk membantu penulis dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori yang cukup relevan dalam menjelaskan permasalahan yang diangkat.

Sebuah teori menampilkan sebuah pandangan sistematis tentang fenomena dengan jalan memberi proposisi-proposisi atau hipotesa-hipotesa yang membahas khusus hubungan-hubungan diantara beberapa variable agar bisa memaparkan penjelasan-penjelasan dan membuat prediksi mengenai fenomena tersebut.³ Untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam

³ James.E.Daugherty dan Robert.L.Pfaltxgarff Jr, *Teori – teori Hubungan Internasional*, terjemahan M.Amien Rais, Harwanto Dahlan, Tulus Warsito, Fisipol UMY, Yogyakarta,1995,hal 46, dari skripsi Nurilita/95510023, *Hambatan Partisipasi Politik Etnhis China di Indonesia Pada Masa Orde Baru*, hal. 7.

rumusan masalah diatas penulis menggunakan *Teori Peran* dan *Teori Persepsi* serta *Teori Partisipasi Politik* untuk menyusun hipotesa.

2. Teori Peran dan Teori Persepsi

a. Teori Peran

Menurut Jack C. Plano, teori peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.⁴ Sedangkan menurut KJ. Holsti, peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada suatu posisi. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sikap posisi itu.⁵

Teori ini mendasarkan bahwa perilaku individu haruslah dipahami dalam konteks sosial. Teori peran menegaskan bahwa "perilaku politik" adalah perilaku dalam menjalankan peranan politiknya.⁶ Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diduga memiliki pola perilaku tertentu pula. Dugaan itulah yang kemudian membentuk suatu peranan, sehingga peranan aktor sangat tergantung dari harapan atau dugaan yang muncul. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Alan C. Isaak:

⁴ Jack C. Plano, Robert E. Riggs, Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 44.

⁵ KJ. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisa*, Bandung, Bina Cipta, 1987, hal. 159.

⁶ Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989, hal.44.

”...role theory suggest that political behavior is to a large extent the result of demand and expectations of the role or roles which a political actor happens to be felling.⁷

Menurut Isaak, harapan bisa berasal dari dalam diri sang aktor, yakni apa yang diharapkan aktor tersebut terhadap peran yang didapatkannya. Harapan juga bisa timbul dari persepsi diri sang aktor tentang peranan yang dimilikinya, apa saja yang harus ia lakukan maupun yang tidak bisa yang ia lakukan. Harapan yang berasal dari diri sang aktor akan menjadi sebuah gagasan bagi dirinya sendiri yang biasanya mencerminkan sikap, kepribadian dan ideologi yang berkembang dalam dirinya, bahkan sebelum ia memegang peranan yang sedang dimainkan. Selain harapan dari diri sang aktor, harapan pun bisa datang dari luar dirinya, misalnya dari kelompok pendukung atau bisa juga dari pihak-pihak yang tidak mendukungnya.

Dengan demikian, apabila teori peran dikaitkan dengan peran Kevin Rudd sebagai aktor politik dalam meningkatkan peran masyarakat Aborigin dalam pemerintahan, maka peranan Kevin Rudd sebagai perdana menteri Australia merupakan harapan dari masyarakat Aborigin dimana harapan itu muncul dari luar diri Kevin Rudd tentang bagaimana caranya meningkatkan peran masyarakat Aborigin dalam pemerintahan. Disini dapat dilihat bahwa harapan atau dugaan yang disebutkan oleh teori peran datang dari kelompok pendukung Kevin Rudd dan seperti yang kita ketahui Kevin Rudd merupakan

⁷ Alan C. Isaak, *Scope and Methods of Political Science*, Homewood, Dorsey Press, 1981, hal 254.

Ketua Partai Buruh yang anggotanya sebagian besar adalah masyarakat dengan kulit berwarna.

Harapan-harapan masyarakat Aborigin sudah sedikit terlihat ketika Rudd menyatakan bahwa akan memasukkan Aborigin kedalam Konstitusi. Rudd bertemu sejumlah pemimpin masyarakat asli di Outback untuk membicarakan langkah yang harus diambil untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat ini di dalam konstitusi Australia⁸.

b. Teori Persepsi

Kenneth Boulding mengungkapkan bahwa teori persepsi adalah reaksi kita terhadap pencitraan kita tentang dunia. Sedangkan dunia nyata dan persepsi kita tentang dunia nyata itu mungkin berbeda. Kita harus mengakui bahwa orang-orang yang menentukan kebijakan dan tindakan-tindakan negara tidak melakukan tanggapan terhadap fakta-fakta mengenai situasi yang obyektif melainkan terhadap citra mereka tentang situasi itu. Yang menentukan perilaku kita adalah persepsi kita tentang dunia, bukan kenyataan dunia itu.⁹ Orang itu melakukan tindakan berdasarkan apa yang dia ketahui. Tanggapan seseorang pada situasi tergantung bagaimana seseorang mendefinisikan situasi. Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan cara orang memandang kenyataan.

⁸ Kompas.com/internasional/Kevin Rudd Ingin Memasukkan Aborigin Kedalam Konstitusi, 2 September 2008.

⁹ Mohtar Mas'ood, Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi, PAU Studi Sosial, p. 19.

Sehubungan dengan kondisi warga Aborigin yang selama ini sangat memprihatinkan, Kevin Rudd sebagai perdana menteri mempunyai persepsi bahwa warga Aborigin merupakan sebuah asset bangsa Australia yang harus diperlakukan sebagaimana mestinya warga negara. Dalam hal ini Rudd mempunyai pandangan terhadap kondisi warga Aborigin yang selama ini tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Persepsi Rudd terhadap masyarakat Aborigin berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada warga Aborigin. Fakta yang terjadi adalah keadaan mereka yang masih berada di garis kemiskinan. Keadaan ini disebabkan oleh perilaku pemerintah dimasa lalu yang selalu mengesampingkan masyarakat pribumi ini. Fakta inilah yang akhirnya membentuk persepsi Rudd terhadap Aborigin sehingga Rudd merasa perlu untuk meminta maaf kepada Aborigin atas perlakuan pemerintah di masa lalu.

2. Teori Partisipasi Politik

Menurut Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Sciences : Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa secara langsung ataupun tidak langsung, dalam proses penentuan kebijakan umum.

"The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of society share in the selection of rulers and directly or indirectly, in the formation of public policy".¹⁰

Kebijakan politik itu mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghasiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, melakukan hubungan atau *contacting* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.¹¹

Sehubungan dengan tindakan tersebut menurut Miriam kegiatan menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri dan dilakukan melalui pemberian suara dalam pemilu. Sebaliknya kecil atau rendah sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan dalam kegiatan politik seperti menjadi anggota atau pimpinan partai politik maupun kelompok kepentingan.

Sejauh ini belum ada masyarakat aborigin yang menjadi pejabat negara. Namun demikian Aborigin telah memiliki beberapa tokoh seperti Matilda House-William dan Richard Wilkes. Banyak diantara mereka yang masih enggan untuk terlibat penuh secara aktif dalam tindakan politik sebagai anggota atau pimpinan partai maupun kelompok kepentingan.

Penderitaan Aborigin tidak juga terselesaikan karena tidak ada perwakilan mereka di tingkat pemerintahan. Begitupula dengan jumlah Aborigin yang terlalu sedikit untuk memiliki wakil di parlemen. Tidak ada

¹⁰ Miriam Budiarto, *Partisipasi Dan Partai Politik Buah Bunga Rampai*, PT Gramedia, Jakarta, 1981, p.1, dari skripsi Nurilita/95510023, *Hambatan Partisipasi Politik Etnhis China di Indonesia Pada Masa Orde Baru*, hal. 7.

¹¹ Ibid.

pemimpin yang dapat menyuarakan kepentingan Aborigin. Apalagi jika mengingat Aborigin terdiri dari beragam komunitas yang mempunyai bahasa dan adat tradisi berbeda sehingga sulit bersatu.

Meskipun Kevin Rudd merupakan pimpinan Partai Buruh pada saat ini, namun Rudd bukanlah seorang Aborigin. Tetapi seperti yang kita ketahui sebagian besar anggota Partai Buruh adalah para buruh dan sebagian besar dari mereka adalah masyarakat kulit berwarna. Dengan berlatar belakang Partai Buruh, Rudd sangat diharapkan mampu membawa angin perubahan bagi masyarakat Aborigin ke arah yang jauh lebih baik.

E. Hipotesa

Berdasarkan uraian dua teori diatas yakni Teori Partisipasi Politik dan Teori Peran, maka dapat ditarik sebuah hipotesa sebagai berikut:

Kevin Rudd berupaya meningkatkan peran masyarakat aborigin dalam kehidupan sosial dan politik di Australia (2007-2009) dengan cara sebagai berikut:

1. Meminta maaf kepada masyarakat Aborigin
2. Meningkatkan partisipasi politik dengan memasukkan Aborigin kedalam konstitusi.
3. Menaikkan anggaran dasar bagi masyarakat Aborigin

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan di angkat dalam sebuah karya ilmiah. Sehingga pembahasan tidak mengalami perluasan yang dapat menyebabkan hasil dari penulisan karya ilmiah menjadi rancu dan tidak ilmiah.

Untuk itu jangkauan penulisan dalam karya ilmiah ini dibatasi pada topik yang diangkat oleh penulis, yaitu kebijakan politik domestik Kevin Rudd dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aborigin dalam kehidupan di Australia dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun (2007-2009). Namun demikian penulisan ini juga mencakup kejadian tahun-tahun sebelumnya yang berhubungan dengan topik pembahasan.

G. Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya berdasarkan dengan kerangka teori, yang kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi pustaka (library research) yaitu dengan mencari data-data sekunder berupa buku-buku, literatur, majalah, tabloid, *surfing* dan *browsing* internet, serta dari sumber-sumber lain yang relevan. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih, yaitu Teori Partisipasi Politik dan Teori Peran.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab, yakni :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab tersebut ditulis tentang ringkasan singkat dari keseluruhan bab yang ada. Berisi Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesis, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Dinamika Peran Masyarakat Aborigin

Bab tersebut akan memberikan sedikit gambaran tentang sejarah suku Aborigin. Selain itu bab ini juga akan mengulas tentang bagaimana posisi masyarakat Australia baik dalam pemerintahan maupun dalam bidang lainnya seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.

Bab III. Dinamika Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Aborigin Sebelum Kevin Rudd

Bab ini berisi tentang kebijakan pemerintah Australia sebelum Kevin Rudd menjabat sebagai Perdana Menteri terhadap posisi masyarakat aborigin dalam pemerintah Australia dan hak-hak yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Aborigin sebagai masyarakat asli Australia.

Bab IV. Upaya Kevin Rudd Terhadap Peran Masyarakat Aborigin

Bab ini berisi tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kevin Rudd beserta hasil yang diperoleh dari upaya tersebut, apakah hasil yang

didapat tersebut positif atau justru negatif, atau justru tidak membuahkan hasil apa-apa.

Bab V. Penutup

Bab terakhir merupakan bab yang menjadi kesimpulan dari seluruh bab sebelumnya yakni Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV sekaligus menjadi penutup.

Lampiran dan Daftar Pustaka

Berisi data buku, literatur dan artikel yang digunakan selama penelitian dan dicantumkan dalam tulisan ini.